



**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM
2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI			i
BAB I	PENDAHULUAN	Hal.	1
	1.1 Latar Belakang	Hal.	1
	1.2 Landasan Hukum	Hal.	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	Hal.	6
	1.4 Sistematika Penulisan	Hal.	6
BAB II	EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI	Hal.	9
	DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020		
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja	Hal.	9
	Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian		
	Renstra Perangkat Daerah		
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	Hal.	14
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas	Hal.	15
	Pokok dan Fungsi		
	2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	Hal.	17
	Masyarakat		
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	Hal.	18
	PERANGKAT DAERAH		
BAB IV	PENUTUP	Hal.	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap komponen organisasi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi diperlukan langkah-langkah strategis kearah pelaksanaan dan pengembangan dari sistem kebijakan RPJMD Kota Batam. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batam serta Visi dan Misi dalam rangka perwujudan public good and service maupun pelayanan prima (service excellence). Untuk mendapatkan kinerja Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang optimal diperlukan adanya program kegiatan yang fisible, transparan dan legitimate sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, bersih serta bertanggung jawab. Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan perencanaan perubahan yang dibuat setiap oleh masing-masing SKPD karena adanya perubahan RKPD akibat adanya perbedaaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2020. Renja ini mengacu kepada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja tahun berjalan. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan disusun mengacu pada dinamika yang terjadi pada tahun berjalan sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Perubahan dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Penyusunan Renja Perubahan merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri tahun 87 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana

pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara berdaya guna dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya harus mampu mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan kependudukan seperti pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, Pemanfaatan Data Kependudukan bagi sektor publik lainnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Kerja Perubahan tahun 2020 dengan 3 Program dan dibagi dalam beberapa jenis kegiatan. Untuk mendukung penyelenggaraan program tersebut serta berkenaan dengan perencanaan berbasis Kinerja dan evaluasi renja pada tahun 2020 maka dalam Renja ini digambarkan Input, output dan Outcome, sehingga bisa dilihat capaian kinerja yang harus diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.2 Landasan Hukum

Sejalan dengan reformasi disegala bidang telah membawa perubahan mendasar dibidang manajemen pemerintahan, wujudnya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

- Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 13. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Elektronik;
 14. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-el;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Permendagri 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99);
26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2016 – 2021;
27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

28. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020.

Payung Hukum sebagaimana tersebut merupakan tujuan tertib Administrasi Pemerintahan yang efisien, efektif, profesional, akuntabel dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Pembuatan Rencana Kerja (Renja) Perubahan dimaksudkan dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2020 yang disebabkan oleh ditemukannya perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2020. Perbedaan asumsi tersebut salah satunya adalah adanya perbedaan perkiraan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2020 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan Program dan Kegiatan pada sisa tahun berjalan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perubahan OPD, proses penyusunan Renja Perubahan OPD, keterkaitan antara Renja Perubahan OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja Kementerian dan Renja Provinsi/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2020)**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai :

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja,
- Faktor penghambat pencapaian kinerja.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH**

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN (2020)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 dikaitkan dengan pencapaian renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut (Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 terlampir).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2020			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun Berjalan (2020)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Non Urusan															
	Bidang Non Urusan															
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur									100%	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur									100%	100 %	100 %	1 tahun	100 %	100 %
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar															
	Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil															
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan KTP	98 %	90,02 %	100%	97,2%	97%	100%	97,5%	97,5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase kepemilikan Kartu Keluarga		98 %	91,75 %	100%	93,01%	93%	100%	93,7%	93,7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase kepemilikan Akta Kelahiran		80 %	81,15 %	82,5%	83,5%	100%	85%	88,3%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan	1 tahun	88,38 %	1 tahun	93,39%	93,39%	1 tahun	99,33%	99,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib pemerintahan dan berpedoman kepada Undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan. Semua ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk mencapai target persentase kepemilikan dokumen kependudukan dilaksanakan kegiatan pelayanan keliling penerbitan administrasi kependudukan, pemeliharaan jaringan online dan hardware, peningkatan SDM, Pembangunan Aplikasi Pelayanan, pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, penataan dokumen Kependudukan, pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan dan intensifikasi pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disamping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran yaitu Begitu Lahir Anak Mendapatkan Akta Kelahiran, kegiatan ini bekerjasama dengan rumah sakit umum dimana jika ada pasien yang melahirkan di tempat tersebut akan langsung mendapatkan Akta Kelahiran setelah mendapat laporan dari rumah sakit. Target kepemilikan KTP-el akan dicapai dengan kegiatan intensifikasi Pelayanan, sedangkan tingkat keakuratan pencatatan peristiwa kependudukan akan dicapai dengan kegiatan pelayanan surat pindah, KK, Pengelolaan Informasi kependudukan dan pemeliharaan jaringan online dan hardware. Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sampai

dengan Bulan Juni Tahun 2020 hasilnya cukup bagus walaupun masih ada yang beberapa yang belum maksimal karena faktor teknis dan kesadaran masyarakat yang kurang untuk tertib administrasi kependudukan. Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sampai dengan Juni Tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel 2.2**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Batam**

No	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Triwulan II 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase kepemilikan KTP			100%	100%	100%	100%	97,2%	97,5%	97,6%	100%	100%	
2	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga			100%	100%	100%	100%	93%	93,7%	94 %	100%	100%	
3	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran			82,5%	85%	96%	100%	83,5%	88,3%	88,6%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyangkut dengan :

Beberapa permasalahan – permasalahan pelayanan terutama yang berkaitan dengan aspek pokok kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
			Belum optimalnya disiplin aparatur
			Belum terwujudnya pengarsipan sesuai klasifikasi
			Belum optimalnya penyusunan dok perencanaan dan anggaran
			Belum optimalnya penyusunan laporan kinerja
			Belum optimalnya penatausahaan keuangan SKPD
		Masih Belum Validnya Data Kependudukan	Belum Optimalnya Pelayanan Sistem Administrasi Kependudukan
			Belum terpenuhinya pemanfaatan data kependudukan
			Belum terwujudnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan ke semua Desa/OPD
	Belum optimalnya pelayanan identitas penduduk		Belum Optimalnya Pelayanan Kartu Identitas Penduduk dan KIA
			Belum Optimalnya pelayanan pindah dating penduduk
			Belum optimalnya pendataan penduduk yang belum memiliki dok Kependudukan
		Masih	Belum optimalnya

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2020 Kota Batam

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	TIDAK ADA USULAN				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Perubahan RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Berdasarkan hak tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan melihat perubahan kondisi yang terjadi pada tahun berjalan maka dari 3 program dan 3 kegiatan yang sudah berjalan dilakukan perubahan menyesuaikan dengan rancangan RKPD Kota Batam dan diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2020. Rincian Program dan Kegiatan pada Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2020 tersebut adalah diperlihatkan pada tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Non Urusan								
	Bidang Non Urusan								
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi	Kota Batam	100%	1.554.843.600	APBD		100%	2,330,993,450
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun	Kota Batam	100%	1.554.843.600	APBD		100%	2,330,993,450
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Kota Batam	100%	25,080,000	APBD		100%	1,363,085,000
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun	Kota Batam	-	-	APBD		100%	943,265,000
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Kota Batam	100%	25,080,000	APBD		100%	419,820,000

				Aparatur	selama 1 tahun							
				Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
				Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan KTP	Kota	100%	2,677,336,000	APBN (DAK)		100%	3,904,510,110
					Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	Batam	100%				100%	
					Persentase kepemilikan Akta Kelahiran		96%				100%	
				Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan selama 1 tahun	Kota Batam	100%	2,677,336,000	APBN (DAK)		100%	3,904,510,110

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Sebelum dan Sesudah Perubahan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Urusan	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
	Renja 2020	Perubahan Renja 2020		Renja 2020	Perubahan Renja 2020	Renja 2020	Perubahan Renja 2020	
Non Urusan	Program Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi					
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun	100 %	100 %	2,133,272,820	1.554.843.600	Rasionalisasi
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi					
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun	100 %	-	799,495,900	-	Rasionalisasi
	Kegiatan Pemeliharaan	Kegiatan Pemeliharaan	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	135,875,725	25.080.000	Rasionalisasi

		Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Aparatur	selama 1 tahun					
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan KTP	100%	100%				
			Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	100%	100%				
			Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	96%	96%				
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan selama 1 tahun	100%	100%	2,677,336,000	3.903.985.000	Keterlambatan pagu DAK Nonfisik dari pusat	

Tabel 3.3
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2020

SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
RKPD TAHUN 2020				RKPD TAHUN 2020			
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA
			APBD Kota				APBD Kota
1.02.06.01.DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.745.980.445	1.02.06.01.DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.483.908.600
0.01.01.01.Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.745.980.445	0.01.01.01.Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.483.908.600
0.01.01.01.01.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.133.272.820	0.01.01.01.01.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.554.843.600
Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap	Batam	23	831.000.000	Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap	Batam	23	900.250.000
Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis	Kota Batam	1	255.956.640	Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis	Kota Batam	1	76.974.000
Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis	Kota Batam	1	5.633.000	Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis	Kota Batam	1	1.776.000
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Kota Batam	1200	6.600.000	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Kota Batam	866	4.600.000
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kota Batam	1	9.816.600	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kota Batam	1	4.298.000
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	Kota Batam	10	170.522.880	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	Kota Batam	3960	31.680.000
Belanja Rekening Telepon	Kota Batam	12	40.800.000	Belanja Rekening Telepon	Kota Batam	12	40.800.000

Belanja Rekening Air	Kota Batam	12	27.600.000	Belanja Rekening Air	Kota Batam	12	27.600.000
Belanja Rekening Listrik	Kota Batam	12	288.000.000	Belanja Rekening Listrik	Kota Batam	12	259.383.000
Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	Kota Batam	3	6.672.000	Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	Kota Batam	3	4.920.000
Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili	Kota Batam	3	134.400.000	Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili	Kota Batam	3	135.000.000
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Kota Batam	23	24.835.500	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Kota Batam	23	41.400.000
Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Kota Batam	1	16.920.000	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Kota Batam	1	4.000.000
Belanja Konsumsi Tamu	Kota Batam	12	-				-
Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen	Kota Batam	12	16.401.200	Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen	Kota Batam	25813	5.162.600
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Kota Batam	98	-				-
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kota Batam	1	284.615.000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kota Batam	1	-
Belanja Pajak Daerah (kendaraan dinas)	Kota Batam	8	10.500.000	Belanja Pajak Daerah (kendaraan dinas)	Kota Batam	7	14.000.000
Belanja Retribusi Daerah (retribusi sampah)	Kota Batam	12	3.000.000	Belanja Retribusi Daerah (retribusi sampah)	Kota Batam	12	3,000,000.00
0.01.01.02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			935.371.625	0.01.01.02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			25.080.000
0.01.01.02.01.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0.01.01.02.01.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			0
0.01.01.02.75.Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur			799.495.900	0.01.01.02.75.Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur			0
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	Kota Batam	1	350.071.900	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	Kota Batam	1	0
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	Kota Batam	6	48.000.000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	Kota Batam	6	0
Belanja Modal Pengadaan Printer (printer inkjet = 6 unit dan printer KTP elektronik = 6 unit)	Kota Batam	12	327.900.000	Belanja Modal Pengadaan Printer (printer inkjet = 6 unit dan printer KTP elektronik = 6 unit)	Kota Batam	12	0
Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer Server	Kota Batam	1	24.475.000	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer Server	Kota Batam	1	0
Belanja Modal Pengadaan Alat/Mesin Pendingin Ruangan	Kota Batam	10	49.049.000	Belanja Modal Pengadaan Alat/Mesin Pendingin Ruangan	Kota Batam	10	0

0.01.01.02.76.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur			135.875.725	0.01.01.02.76.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur			25.080.000
Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	Kota Batam	9	68.400.000	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	Kota Batam	4	5862500
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	Kota Batam	4	4.280.000	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	Kota Batam	4	0
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Kota Batam	143	63.195.725	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Kota Batam	72	19.217.500
1.02.06.15.Program Penataan Administrasi Kependudukan			2.677.336.000	1.02.06.15.Program Penataan Administrasi Kependudukan			3.903.985.000
1.02.06.15.01.Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)			2.677.336.000	1.02.06.15.01.Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)			3.903.985.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (peralatan SIAK)	Kota Batam	1	36.526.600	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (peralatan SIAK)	Kota Batam	1	-
Honorarium Jasa Narasumber	Batam	2	3.800.000	Honorarium Jasa Narasumber	Batam	4	21.600.000
Honorarium Penyelenggara Kegiatan	Kota Batam	1	500.000	Honorarium Penyelenggara Kegiatan	Kota Batam	1	-
Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis (Ribbon Printer KTP-el, HDP Film e-KTP, Cleaning Kit e-KTP)	Kota Batam	3	1.234.728.000	Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis (Ribbon Printer KTP-el, HDP Film e-KTP, Cleaning Kit e-KTP)	Kota Batam	15	2.768.486.000
Belanja Perlengkapan Peserta	Kota Batam	100	4.300.000	Belanja Perlengkapan Peserta	Kota Batam	100	-
Belanja Pencetakan dan Penjilidan (blanko dan form pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil)	Kota Batam	1	1.164.581.400	Belanja Pencetakan dan Penjilidan (blanko dan form pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil)	Kota Batam	1	710.000.500
Belanja Sewa Gedung Kantor dan Gedung Lainnya (sosialisasi)	Kota Batam	1	27.500.000	Belanja Sewa Gedung Kantor dan Gedung Lainnya (sosialisasi)	Kota Batam	200	40.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kota Batam	1	201.800.000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kota Batam	1	298.260.000
Belanja Transportasi Udara	Kota Batam	1	2.000.000	Belanja Transportasi Udara	Kota Batam	1	-
Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (narasumber)	Kota Batam	1	1.600.000	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (narasumber)	Kota Batam	1	-

Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (narasumber)	Kota Batam	1	1.600.000	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (narasumber)	Kota Batam	1	-
			0	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kota Batam	65	9.750.000
			0	Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor	Kota Batam	14	2.138.500
			0	Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan	Kota Batam	5	2.750.000
			0	Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen	Kota Batam	30000	6.000.000
			0	Belanja Jasa Media Elektronik	Kota Batam	180	45.000.000

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 ini merupakan pelaksanaan dari Rancangan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2020 yang disebabkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah rencana program dan kegiatan RKPD. Dengan disusunnya Renja Perubahan Tahun 2020 ini dengan baik, maka mudah-mudahan dokumen turunan atau lanjutan dari pelaksanaan Renja ini ke depan juga akan baik.

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggung jawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan.

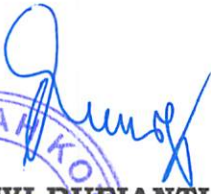

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2020 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020;

3. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Tahun 2020 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Tahun 2020.

Batam, 27 Agustus 2020

**a.n. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BATAM
Sekretaris,**



DEWI RUFIAN TI, AMP.
NIP. 19670103 198602 2 003